

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran

*Dasar
Hukum
Entitas Dan
Rencana
Strategis*

Dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Perpres tersebut, organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan berubah menjadi:

- 1) Sekretariat Jenderal;
- 2) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
- 3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- 4) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- 5) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- 6) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- 7) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 8) Inspektorat Jenderal;
- 9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 10) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- 11) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 12) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;
- 13) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut; dan
- 14) Staf Ahli Bidang Hilirisasi dan Diversifikasi Pasar.

Dalam organisasi baru, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) di ubah menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM-KP). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian bidang ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama

ekonomi kelautan dan perikanan pada hakekatnya terkait dengan persoalan-persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini relevan dengan Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi KKP adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi KKP, sebagai berikut :

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, pelindungar lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah;
- 6) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 7) Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- 8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Guna mewujudkan peran KKP dalam pembangunan nasional sebagaimana diuraikan diatas, maka diperlukan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan (SDM-KP) yang kompeten, mempunyai karakter kuat serta kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam grand strategy pembangunan KKP dalam RPJMN III Tahun 2025 – 2029

disebutkan “Penguatan SDM Kompeten secara terintegrasi” disamping kebijakan lainnya. Dalam kaitan ini, Politeknik KP Pangandaran mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan bidang kelautan dan perikanan. Agar program pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang diinginkan, maka diperlukan sebuah strategi dan perencanaan yang baik dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Politeknik KP Pangandaran.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Raya Babakan KM.2 Pangandaran Jawa Barat 46396.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran berkomitmen dengan visi dan misi :

- VISI

Mencetak SDM yang Unggul dalam Bidang IPTEK Terapan dan technopreneur Kelautan Perikanan serta menjadi Lembaga pendidikan vokasi terbaik pada level Indonesia pada tahun 2030.

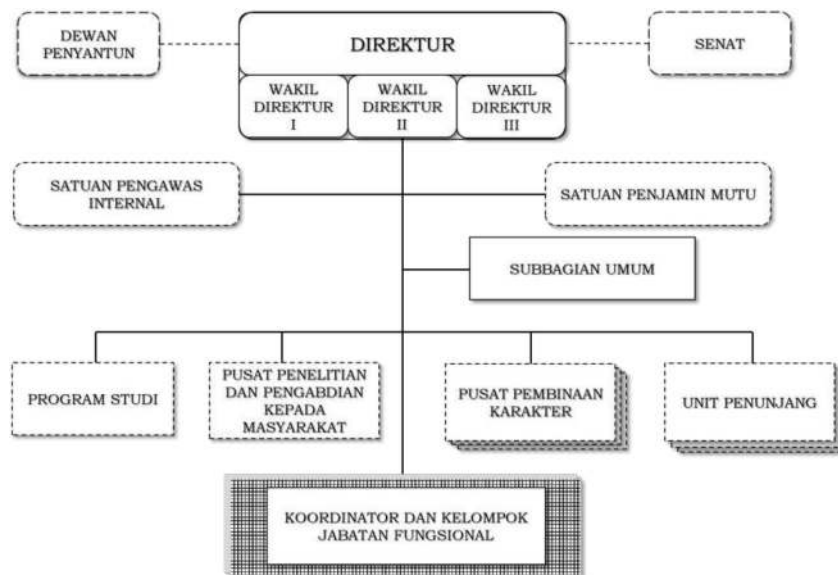
- MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis IPTEK Terapan yang unggul;
2. Menyelenggarakan penelitian IPTEK Terapan yang mampu di terapkan oleh masyarakat;

3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEK Terapan yang mampu memberikan solusi praktis kebutuhan masyarakat;
4. Menyelenggarakan pendidikan technopreneur kepada taruna;
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi terkait di level nasional;
6. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan beasiswa pendidikan;
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang mutakhir; dan
8. Menanamkan wawasan dan kepribadian bangsa yang berkarakter pancasila.

Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91/PERMEN-KP/2020 pada tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, bahwa Struktur Organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



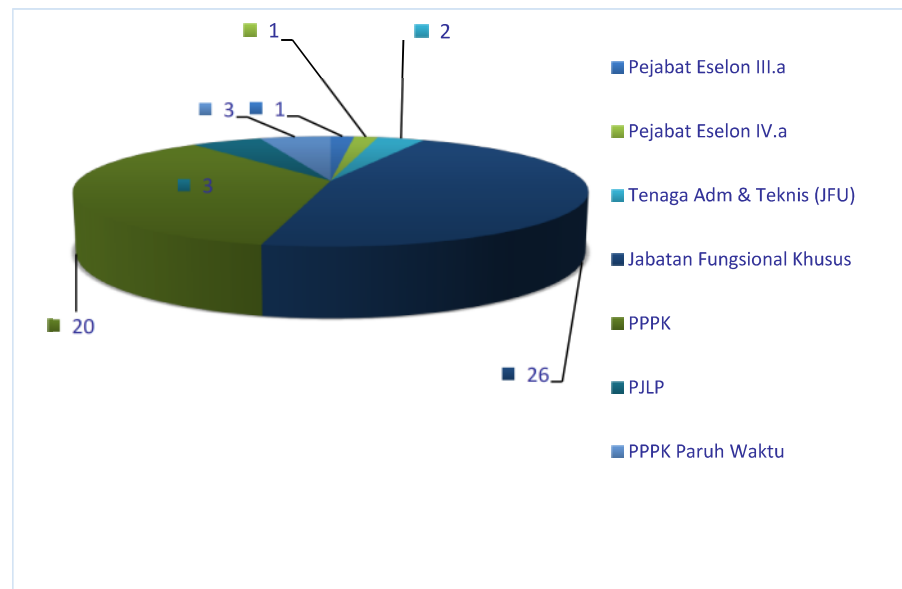
Struktur Organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan
Pangandaran Tahun 2025

❖ **Keragaan SDM (Kekuatan SDM)**

Pada Laporan Keuangan Tahunan Audited TA.2025 Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran mempunyai total pegawai sebanyak 56 orang, terdiri dari 30 PNS dan 20 PPPK. Untuk mengoptimalkan kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, dengan sumberdaya manusia yang ada, pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil dibantu oleh 3 orang PPPK Paruh Waktu dan PJLP sebanyak 3 orang. Komposisi pegawai di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran adalah sebagai berikut.

- Jumlah pegawai berdasarkan golongan
Komposisi jumlah ASN Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran berdasarkan golongan/ruang periode Tahunan Audited TA.2025 terdiri atas Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 28 orang dan Golongan II sebanyak 1 orang.
- Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan
Jumlah ASN Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran Tahunan Audited TA.2025 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari jenjang S3 sebanyak 1 orang, jenjang S2 sebanyak 27 orang, jenjang S1/D4 sebanyak 4 orang, dan jenjang D3 sebanyak 2 orang. PPPK jenjang pendidikan D4/S1 sebanyak 7 orang, jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak 8 orang dan jenjang pendidikan SMP sebanyak 1 orang. Untuk PJLP jenjang S1/D4 sebanyak 1 orang dan jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak 2 orang.
- Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional
Komposisi jumlah ASN Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran Tahunan Audited TA. 2025 berdasarkan jabatan fungsionalnya terdiri atas jabatan fungsional dosen sebanyak 23 orang, fungsional Perbendaharaan sebanyak 1 orang, fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama sebanyak 1 orang dan fungsional umum/pelaksana sebanyak 2 orang dan struktural sebanyak 1 orang. PPPK jabatan Analisis SDM Aparatur Pertama sebanyak 1 orang, Pustakawan Pertama sebanyak 1 orang, Perawat Pertama sebanyak 1 orang, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama sebanyak 1 orang.

Komposisi pegawai Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dapat dilihat sebagai berikut :



A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang

dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan

asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Jalan, Jaringan, Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 September 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data dasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
 - Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

*Aset
Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 September 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini

diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

(9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 September 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Periode LK Tahunan Audited Tahun Anggaran 2025, **Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran** sudah melakukan 16 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA awal sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1
DIPA Awal dan Revisi DIPA Tahun 2025

Uraian	2025	2025
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	REVISI
Pendapatan		
Pendapatan	366.025.000	366.025.000
Jumlah Pendapatan	366.025.000	366.025.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.681.000.000	7.060.180.000
Belanja Barang	7.928.251.000	5.123.842.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	14.609.251.000	12.184.022.000

Dari data tabel diatas dijelaskan bahwa pagu totalnya sebesar Rp12.184.022.000,- yang terdiri atau bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp11.931.665.000,- dan PNPB TA Berjalan sebesar Rp252.357.000,-.dimana anggaran PNPB ini terkena blokir.

Pada Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran selama periode Tahunan Audited Tahun anggaran 2025, dilakukan revsi DIPA sebanyak 16 kali. Rinciannya sebagai berikut :

No.	Urutan Revisi	Penjelasan
1.	Revisi Ke-1 DIPA pada tanggal 18 Desember 2024	Revisi 1 (Revisi KPA) adalah Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
2.	Revisi Ke-2 DIPA pada tanggal 21 Februari 2025	Revisi 2 (Revisi DJA) adalah Revisi Pagu anggaran tetap, Revisi Efisiensi Anggaran, dan Revisi perubahan rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA
3.	Revisi Ke-3 DIPA pada tanggal 9 April 2025	Revisi 3 (Revisi DJA) adalah Revisi pagu anggaran tetap, Revisi relaksasi blokir anggaran (Kode A), dan Revisi perubahan rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA
4.	Revisi Ke-4 DIPA pada tanggal 15 April 2025	Revisi 4 (Revisi Kanwil) adalah Revisi Administrasi, dan Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap
5.	Revisi Ke-5 DIPA pada tanggal 19 Juni 2025	Revisi 5 (Revisi KPA) adalah Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA
6.	Revisi Ke-6 DIPA pada tanggal 24 Juni 2025	Revisi 6 (Revisi KPA) adalah Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA
7.	Revisi Ke-7 DIPA pada tanggal 15 Juli 2025	Revisi 7 (Revisi DJA) adalah Revisi pagu anggaran tetap, Revisi pergeseran anggaran antar SATKER lingkup BPPSDM, Revisi rekomposisi blokir anggaran (kode blokir A) antar SATKER lingkup BPPSDM, dan Revisi perubahan Rencana Penarikan Dana

- (RPD) dan pemuktahiran halaman III DIPA.
8. Revisi Ke-8 DIPA pada tanggal 16 Juli 2025 Revisi 8 (Revisi KPA) adalah Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA
 9. Revisi Ke-9 DIPA pada tanggal 28 Juli 2025 Revisi 9 (Revisi KPA) adalah Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA
 10. Revisi Ke-10 DIPA pada tanggal 1 September 2025 Revisi 10 (Revisi DJA) adalah Revisi pagu anggaran berubah, Revisi anggaran buka blokir, revisi pergeseran pagu anggaran operasional ke non operasional, dan Revisi perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada pemuktahiran halaman III DIPA.
 11. Revisi Ke-11 DIPA pada tanggal 4 September 2025 Revisi 11 (Revisi KPA) adalah Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA
 12. Revisi Ke-12 DIPA pada tanggal 6 Oktober 2025 Revisi 12 (Revisi Kanwil) adalah Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA
 13. Revisi Ke-13 DIPA pada tanggal 21 Oktober 2025 Revisi 13 (Revisi KPA) adalah Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA
 14. Revisi Ke-14 DIPA pada tanggal 19 November 2025 Revisi 14 (Revisi DJA) adalah Usulan Revisi Belanja Gaji Pegawai lingkup BPPSDM KP
 15. Revisi Ke-15 DIPA pada tanggal 27 November 2025 Revisi 15 (Revisi KPA) adalah Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA
 16. Revisi Ke-16 DIPA pada tanggal 12 Desember 2025 Revisi 16 (Revisi KPA) adalah Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Negara*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp85.049.871,- atau mencapai 23,24% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp365.968.000,-.

Rp85.049.871, Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 23,24% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh dampak dari efisiensi anggaran APBN pada beberapa Kementerian/ Lembaga termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga kegiatan lingkup satuan pendidikan KP khususnya Politeknik KP Pangandaran mengenai Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya pada akun 425112 juga mengalami penurunan dan memberikan dampak langsung pada sumber utama dari penerimaan negara (PNBP).

Pendapatan Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran terdiri dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi serta Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Semester II Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
Pendapatan Lain-lain (A)	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak (B)	366.025.000	85.049.871	166,31
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (425112)	330.275.000	50.050.000	15,15
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan (425131)	25.000.000	12.790.000	51,16
Pendapatan Ujian / Seleksi Masuk Pendidikan (425411)	6.750.000	-	-
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119)	-	4.640.000	100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi(425151)	-	11.069.871	100,00
Pendapatan Biaya Pendidikan (425412)	4.000.000	6.500.000	162,50
Jumlah Pendapatan (C = A+B)	366.025.000	85.049.871	23,24

Realisasi Pendapatan periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan 70,31% dibandingkan Periode Tahunan Audited TA 2024, perbandingan realisasi pendapatan Periode Tahunan TA 2025 dan Periode Tahunan TA 2024 sebagai berikut :

Tabel 3
Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode Tahunan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Periode Semester II/Tahunan TA. 2025		
	Realisasi	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Lain-lain (A)	-	15.107.243	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	-	15.107.243	(100,00)
Pendapatan Negara Bukan Pajak (B)	85.049.871	271.388.989	(68,66)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (425112)	50.050.000	216.315.000	(76,86)
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan (425131)	12.790.000	26.511.989	(51,76)
Pendapatan Ujian / Seleksi Masuk Pendidikan (425411)	-	-	-
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119)	4.640.000	14.562.000	(68,14)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi(425151)	11.069.871	-	100,00
Pendapatan Biaya Pendidikan (425412)	6.500.000	14.000.000	(53,57)
Jumlah Pendapatan (C = A+B)	85.049.871	286.496.232	(70,31)

Berikut penjelasan terkait realisasi pendapatan sampai 31 Desember TA. 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan senilai Rp50.050.000,- merupakan Setoran Pendapatan Hasil Panen Udang Vaname Sebanyak 910 kg yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan hasil samping Budidaya Udang Vannamei tahap 1 yaitu TEFA Tambak/Budidaya pada Kantor Politeknik KP Pangandaran. Harga Panen sesuai dengan PP Tarif No.85 Tahun 2021 sebesar Rp55.000,00. Rincian panen udang seperti dibawah ini :

Uraian	Volume	Harga /Kg	Jumlah Setoran
Setoran Udang Vannamei Tahap 1 tanggal 1 Desember 2025	910	55.000	50.050.000
JUMLAH			50.050.000

2. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan senilai Rp12.790.000,- yang berasal dari sewa lahan tambak Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi dengan luas 10.000 M².
3. Pendapatan Biaya Pendidikan senilai Rp6.500.000,- yang merupakan Penerimaan Pendapatan Biaya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebanyak 56 taruna/mahasiswa, sesuai surat dinas nomor : B.729/POLTEK.PND/KU.220/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 dan Penerimaan Pendapatan Biaya Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sebanyak 56 taruna/mahasiswa, sesuai surat dinas nomor : B.729/POLTEK.PND/KU.220/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagaimana surat terlampir.

4. Pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya sejumlah Rp4.640.000,-. Pendapatan ini berasal dari Hasil samping kegiatan TEFA Pengolahan dan TEFA TKL untuk tercapainya kompetensi taruna/mahasiswa Program Studi Pengolahan Hasil Laut dan Teknologi Kelautan.
5. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp11.069.871,- yaitu pendapatan dari pegawai yang menempati rumah dinas atau flat dosen sebanyak 11 pegawai.

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
Rp*
Rp11.814.981.
585,-

Realisasi Belanja Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran pada Periode Tahunan Audited TA. 2025 adalah sebesar Rp11.814.981.585,- atau mencapai 96,97% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.184.022.000,. Rincian anggaran dan realisasi belanja Periode Audited TA. 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2025*

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7.060.180.000	6.973.728.910	98,78
Belanja Barang	5.123.842.000	4.841.252.675	94,48
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	12.184.022.000	11.814.981.585	96,97
Pengembalian		-	-
Jumlah	12.184.022.000	11.814.981.585	96,97

Realisasi Belanja Periode Tahunan Audited TA. 2025 mengalami kenaikan sebesar 18,45% apabila dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Belanja Pegawai mengalami peningkatan karena adanya realisasi pembayaran Gaji, Gaji Ke-13 dan Tunjangan Kinerja Ke-13 dan Tunjangan Kinerja ke-14 (THR), Penerimaan Pegawai PPPK sebanyak 20 orang, pegawai PPPK Paruh Waktu 3 orang dan pegawai yang telah selesai melakukan Tugas Belajar serta tidak adanya belanja modal.

*Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja Periode Tahunan TA. 2025 dan TA 2024*

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.973.728.910	6.680.198.779	4,39
Belanja Barang	4.841.252.675	7.563.034.262	(35,99)
Belanja Modal	-	244.918.572	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	11.814.981.585	14.488.151.613	(18,45)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp6.973.728.910,-

Realisasi Belanja Pegawai Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.973.728.910,- dan Rp6.680.198.779,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Periode Audited TA. 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 6

Perbandingan Belanja Pegawai Periode Tahunan TA. 2025 dan TA. 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.634.161.100	1.698.307.200	(3,78)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.588	24.493	(7,78)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	135.754.810	139.801.530	(2,89)
Belanja Tunjangan Anak PNS	44.932.024	44.025.680	2,06
Belanja Tunjangan Struktural PNS	7.560.000	7.560.000	-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	299.490.000	311.245.000	(3,78)
Belanja Tunjangan PPH PNS	18.041.688	21.624.676	(16,57)
Belanja Tunjangan Beras PNS	98.780.880	100.663.800	(1,87)
Belanja Uang Makan PNS	233.546.000	223.736.000	4,38
Belanja Tunjangan Umum PNS	7.515.000	8.455.000	(11,12)
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	873.573.775	654.628.110	33,45
Belanja Gaji Pokok PPPK	338.602.900	219.470.800	54,28
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.865	4.651	26,10
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	21.892.930	12.977.000	68,71
Belanja Tunjangan Anak PPPK	7.317.910	4.856.890	50,67
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	26.950.000	30.130.000	(10,55)
Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.726.000	13.252.860	63,93
Belanja Uang Makan PPPK	71.800.000	38.850.000	84,81
Belanja Tunjangan Umum PPPK	8.730.000	-	100,00
Belanja Uang Lembur	117.699.000	127.259.000	(7,51)
Belanja Pegawai (Tunjangan khusus/Kegiatan)	3.006.976.486	3.028.095.093	(0,70)
Jumlah Belanja Kotor	6.975.078.956	6.684.967.783	4,34
Pengembalian Belanja Pegawai	1.350.046	4.769.004	(71,69)
Jumlah Belanja	6.973.728.910	6.680.198.779	4,39

Berdasarkan Tabel 6 Realisasi belanja pegawai Periode Audited TA. 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,39% dari TA. 2024. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya realisasi pembayaran Gaji, Gaji Ke-13 dan Tunjangan Kinerja Ke-13 dan Tunjangan Kinerja ke-14 (THR), Penerimaan Pegawai PPPK sebanyak 20 orang, pegawai PPPK Paruh Waktu 3 orang, pegawai yang telah selesai melakukan Tugas Belajar serta Pengembalian belanja pegawai terdiri dari belanja pembulatan gaji PNS, belanja tunjangan suami/istri PNS, fungsional PNS, dan belanja tunjangan khusus/kegiatan/kinerja.

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp4.841.252.6
75,-

Realisasi Belanja Barang Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.841.252.675,- dan Rp7.563.034.262,-. Realisasi Belanja Barang Periode Tahunan TA. 2025 mengalami penurunan sebesar 2,43% dari Realisasi Belanja Barang TA. 2024.

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang Periode Tahunan TA. 2025 dan TA. 2024

URAIAN	TA.2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (A)	749.902.170	2.054.135.279	(63,49)
Belanja Keperluan Perkantoran	657.382.170	1.028.490.429	(36,08)
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	-	933.320.850	(100,00)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	176.000	(100,00)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	92.520.000	92.148.000	0,40
Belanja Barang Operasional Lainnya	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional (B)	2.129.635.436	2.315.524.920	(8,03)
Belanja Bahan	175.103.119	293.614.200	(40,36)
Belanja Honor Output Kegiatan	9.000.000	21.082.000	(57,31)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.945.532.317	2.000.828.720	(2,76)
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan (C)	325.867.898	989.929.945	(67,08)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	285.939.752	751.031.804	(61,93)
Belanja Barang Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	238.898.141	(100,00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Beban Persediaan Barang dalam proses	24.928.146	-	-
Beban Persediaan Lainnya	15.000.000	-	-
Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Jasa (D)	784.350.301	1.080.824.407	(27,43)
Belanja Langganan Listrik	186.743.220	325.939.020	(42,71)
Belanja Langganan Telepon	-	-	-
Belanja Langganan Air	45.629.400	8.855.000	415,30
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	88.088.540	233.747.566	(62,31)
Belanja Sewa	98.820.000	57.000.000	73,37
Belanja Jasa Profesi	91.270.000	117.525.000	(22,34)
Belanja Jasa Lainnya	273.799.141	337.757.821	(18,94)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan (E)	765.142.122	574.829.247	33,11
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	624.348.764	380.732.796	63,99
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.793.358	194.096.451	(27,46)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (F)	88.131.248	547.790.464	(83,91)
Belanja Perjalanan Biasa	88.131.248	527.090.464	(83,28)
Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	20.700.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah Belanja (H=A+B+C+D+E+F)	4.843.029.175	7.563.034.262	(35,96)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0,-

Realisasi Belanja Modal Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp244.918.572,-. Tidak ada Belanja modal dimana merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Periode Audited TA. 2025 mengalami penurunan sebesar 100% dari Realisasi Belanja Modal pada TA. 2024. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode Tahunan TA. 2025 dan TA. 2024 sebagai berikut :

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja Periode Tahunan
Audited TA. 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	134.909.550	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	110.009.022	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	244.918.572	(100,00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	244.918.572	(100,00)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Periode Tahunan Audited TA. 2025 adalah sebesar Rp0,-terjadi penurunan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi TA. 2024 sebesar Rp182.713.770,-.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode Tahunan TA. 2025 dan TA. 2024

URAIAN	TA. 2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	134.909.550	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	134.909.550	(100,00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	134.909.550	(100,00)

Tidak ada Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Periode Tahunan Audited TA. 2025.

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan TA. 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp110.009.022,-. Perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan TA. 2024 sebagai berikut :

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode Tahunan Audited
TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Pembangunan Kolam Tambak Udang Vannamei	-	110.009.022	100,00
Jumlah Belanja Kotor	-	110.009.022	100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	110.009.022	100,00

B.5.3 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Periode Tahunan Audited TA.2025 dan TA.2024 sebesar Rp. 0,-

Tabel 12.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan Periode Tahunan Audited TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 202	TA 202	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Periode Tahunan Audited TA 2025 adalah sebesar Rp0,-. Perbandingan realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan sebagai berikut.

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Periode TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung	-	-	-
Supervisi Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Periode Tahunan Audited TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0,-. Perbandingan realisasi belanja modal Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Periode Tahunan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA.2025	TA.2024
Saldo UP (Voucher/Panjer)	-	-
Kuitansi UP belum di SPJkan	-	-
Saldo TUP	-	-
Jumlah	-	-

Berita acara penutupan kas dan jumlah uang di bank terdapat pada lampiran Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran dan rekening koran dari Bank Negara Indonesia (BNI) terlampir.

Rincian Saldo UP Per 31 Desember Tahun 2025 yaitu terdiri dari kas tunai brankas sebesar Rp0,- dan kas bank sebesar Rp0,- dan Saldo UP Tahun 2024 adalah kas tunai brankas sebesar Rp0,- dan kas bank sebesar Rp0,-.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Periode
Tahunan Audited TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TA.2025	TA.2024
Saldo UP (Voucher/Panjer)	-	-
Kuitansi UP	-	-
Saldo TUP	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas **NIHIL** -

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP baik saldo rekening dibank maupun uang tunai. Rincian sumber kas lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per tanggal 31 Desember 2025 dan Tahun 2024*

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	NIHIL	-

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

*Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0,-*

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

*Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Periode Tahunan TA
2025 dan 2024*

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (Prepaid)	-	-
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (Prepaid)	-	-
Jumlah	-	-

C.5 Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)

*Uang Muka Belanja
Pegawai
(Prepayment) Rp0,-*

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

*Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Periode Tahunan
TA 2025 dan 2024*

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Uang Muka Belanja	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja : tidak ada uang muka belanja di satuan kerja Politeknik KP Pangandaran pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

C.6 Pendapatan yang masih harus Diterima

Pendapatan yang
masih harus
Diterima Rp0,-

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Periode Tahunan TA 2025 dan 2024

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Pendapatan yang masih harus diterima	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.7 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak Rp137.058,-

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp137.058,- dan Rp16.500.000,-. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Periode Tahunan TA 2025 dan 2024

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24	Naik/turun
Piutang Bukan Pajak	137.058	16.500.000	(11.939)
Jumlah	137.058	16.500.000	(11.939)

Penjelasan tentang Piutang Bukan Pajak adalah Pengembalian belanja pembayaran tunjangan kinerja PNS Bulan Desember an Djaduk Alif Prabangkara sebesar Rp137.058,- dan sudah dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2025 sebagaimana terlampir.

C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak Rp(685,-)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan TA. 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(685,-) dan Rp(82.500,-).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur yaitu sebesar 5 permil dari besaran piutang bukan pajak. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih tersebut berasal dari pengembalian kelebihan bayar tunjangan kinerja/ khusus/ kegiatan PNS bulan Desember TA. 2025 sebesar Rp685,-.

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan TA. 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Periode Tahunan TA.2025 dan TA.2024*

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0,-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan TA. 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA dan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran periode Tahunan TA. 2025 dan TA. 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan TA. 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Periode Tahunan TA. 2025 dan TA. 2024

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp0,-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan TA. 2024 masing - masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Periode Tahunan TA. 2025 dan TA. 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.15 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp0,-

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.16 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.17 Persediaan

Persediaan Rp2.743.500,-

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.743.500,- dan Rp0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Persediaan

Jenis	31-Des-25	31-Des-24
Barang Konsumsi	2.743.500	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	2.743.500	-

C.18 Tanah

Tanah
Rp68.727.082.950,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran Periode Tahunan Audited TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp68.727.082.950,-. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jalan Raya Babakan KM.02 Desa Babakan, Kec/Kab. Pangandaran. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Tanah

No	KIB	Luas	Nilai
1	2.01.01.04.001	100.000 M2	68.727.082.950
Jumlah			68.727.082.950

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Tanah

No	Luas	Keterangan	Nilai
1	100.000 m2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	68.727.082.950
2	10.000 m2	Tanah yang di sewa Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi untuk Usaha Budidaya Udang Vaname	
Jumlah			68.727.082.950

C.19 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp11.839.366.421,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp11.839.366.421,- dan Rp12.591.260.421,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23.

Saldo Nilai Perolehan Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember TA
2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	12.591.260.421
Mutasi tambah:	0
-Penambahan peralatan dan mesin	0
-Koreksi Susulan	0
-Transfer masuk	0
-Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	
Mutasi kurang:	751.894.000
-Koreksi Pencatatan	0
-Pencatatan Barang yang akan dihapuskan	751.894.000
Saldo per 31 Desember 2025	11.839.366.421
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(10.911.125.308)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	928.241.113

Terdapat Pencatatan Barang yang akan dihapuskan berupa angkutan darat bermotor sebanyak 4 unit atau sebesar Rp751.894.000,- ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dari Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran melalui Aplikasi Siman Versi2.

C.20 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister
Rp0,

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

C.21 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp54.570.420.841,-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp54.570.420.841,- dan Rp54.570.420.841,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 24

Saldo Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember TA 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	54.570.420.821
Mutasi tambah:	-
- Gedung dan Bangunan	-
- Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-
- Reklas Masuk	-
- Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
- Koreksi Nilai	-
- koreksi Pencatatan	-
- Transaksi Normalisasi	-
Saldo per 31 Desember 2025	54.570.420.821
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(7.835.456.440)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	46.734.964.381

Tidak Terdapat Penambahan nilai Gedung dan Bangunan pada Periode Tahunan Audited TA. 2025.

C.22 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp8.598.704.348,-

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp8.598.704.348,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	8.598.704.348
Mutasi tambah:	-
- Pengembangan Nilai	-
Mutasi kurang:	-
-	-
Saldo per 31 Desember 2025	8.598.704.348
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	4.453.876.629
Nilai Buku per 31 Desember 2025	13.052.580.977

C.23 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp97.800.000,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp97.800.000,-.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	97.800.000
Mutasi tambah:	-
- Reklas Masuk	-
- Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
-	-
Saldo per 31 Desember 2025	97.800.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Saldo per 31 Desember 2025	97.800.000

C.24 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,-

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

C.25 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(23.200.458.377),-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(23.200.458.377),- dan Rp(21.621.748.515),-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	68.727.082.950	0	68.727.082.950
2	Peralatan dan Mesin	11.839.366.421	10.911.125.308	928.241.113
3	Gedung dan Bangunan	54.460.411.819	7.835.456.440	46.624.955.379
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.598.704.348	4.453.876.629	4.144.827.719
5	Aset Tetap Lainnya	97.800.000	0	97.800.000
Akumulasi Penyusutan		143.723.365.538	23.200.458.377	120.522.907.161

C.26 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud pada SUPM Tegal berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak ada Mutasi transaksi terhadap

Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Software	-
Jumlah	-

C.27 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp0,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- Reklas dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- Normalisasi	-
Pencatatan barang yang akan dihapuskan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C.28 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0,-.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.29 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp34.332.580,-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp34.332.580,- dan Rp53.080.038,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Politeknik KP Pangandaran per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Penjurnalan Memo Penyesuaian atas pemakaian dan tagihan belanja tahun 2025 di Politeknik KP Pangandaran	34.332.580
Jumlah	34.332.580

Terdapat nilai utang kepada pihak ketiga berupa penyesuaian jurnal tahun 2025 yaitu :

1. Jurnal penyesuaian diatas merupakan jurnal atas pemakaian tagihan listrik bulan Desember tahun 2025 sebesar Rp12.392.200,-.
2. Jurnal penyesuaian diatas merupakan jurnal atas pemakaian tagihan Internet bulan Desember tahun 2025 sebesar Rp6.968.580,- dan
3. Jurnal penyesuaian diatas merupakan jurnal atas pemakaian tagihan PDAM bulan Desember tahun 2025 sebesar Rp14.971.800,-.

C.30 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0,-

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak ada Utang Yang Belum Ditagihkan pada satuan kerja Politeknik KP Pangandaran tahun 2025.

C.31 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.32 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

KPPN Rp0,-

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.33 Ekuitas

Ekuitas

Rp120.601.463.476,-

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp120.601.463.476,- dan Rp122.926.857.507,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan

Operasional

Rp85.049.871,-

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp85.049.871,- dan Rp271.388.989,-. Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Berikut penjelasan terkait realisasi pendapatan sampai 31 Desember TA. 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan senilai Rp50.050.000,- merupakan Setoran Pendapatan Hasil Panen Udang Vaname Sebanyak 910 kg yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan hasil samping Budidaya Udang Vannamei tahap 1 yaitu TEFA Tambak/Budidaya pada Kantor Politeknik KP Pangandaran. Harga Panen sesuai dengan PP Tarif No.85 Tahun 2021 sebesar Rp55.000,00. Rincian panen udang seperti dibawah ini :

Uraian	Volume	Harga /Kg	Jumlah Setoran
Setoran Udang Vannamei Tahap 1 tanggal 1 Desember 2025	910	55.000	50.050.000
JUMLAH			50.050.000

2. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan senilai Rp12.790.000,- yang berasal dari sewa lahan tambak Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi dengan luas 10.000 M².
3. Pendapatan Biaya Pendidikan senilai Rp6.500.000,- yang merupakan Penerimaan Pendapatan Biaya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebanyak 56 taruna/mahasiswa, sesuai surat dinas nomor : B.729/POLTEK.PND/KU.220/III/2025 tanggal 6 Maret

2025 dan Penerimaan Pendapatan Biaya Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sebanyak 56 taruna/mahasiswa, sesuai surat dinas nomor : B.729/POLTEK.PND/KU.220/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagaimana surat terlampir.

4. Pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya sejumlah Rp4.640.000,-. Pendapatan ini berasal dari Hasil samping kegiatan TEFA Pengolahan dan TEFA TKL untuk tercapainya kompetensi taruna/mahasiswa Program Studi Pengolahan Hasil Laut dan Teknologi Kelautan.
5. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp11.069.871,- yaitu pendapatan dari pegawai yang menempati rumah dinas atau flat dosen sebanyak 11 pegawai.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp6.948.954.624,-

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.948.954.624,- dan Rp6.704.836.007,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 30
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.634.161.100	1.698.307.200	(3,78)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.588	23.347	(3,25)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	135.754.810	139.801.530	(2,89)
Belanja Tunjangan Anak PNS	44.932.024	44.025.680	2,06
Belanja Tunjangan Struktural PNS	7.560.000	7.560.000	-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	299.490.000	307.173.562	(2,50)
Belanja Tunjangan PPH PNS	18.041.688	21.624.676	(16,57)
Belanja Tunjangan Beras PNS	98.780.880	100.663.800	(1,87)
Belanja Uang Makan PNS	233.546.000	223.736.000	4,38
Belanja Tunjangan Umum PNS	7.515.000	7.758.580	(3,14)
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	873.573.775	654.628.110	33,45
Belanja Gaji Pokok PPPK	338.602.900	219.470.800	54,28
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.865	4.651	26,10
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	21.892.930	12.977.000	68,71
Belanja Tunjangan Anak PPPK	7.317.910	4.856.890	50,67
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	26.950.000	30.130.000	(10,55)
Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.726.000	13.252.860	63,93
Belanja Uang Makan PPPK	71.800.000	38.850.000	84,81
Belanja Tunjangan Umum PPPK	8.730.000	-	100,00
Belanja Uang Lembur	117.699.000	127.259.000	(7,51)
Belanja Pegawai (Tunjangan khusus/Kegiatan	2.982.202.200	3.052.732.321	(2,31)
Jumlah Belanja Kotor	6.950.304.670	6.704.836.007	3,66
Pengembalian Belanja Pegawai	1.350.046	4.769.004	(71,69)
Jumlah Belanja	6.948.954.624	6.700.067.003	3,71

Berdasarkan Tabel 30 Realisasi belanja pegawai Periode Tahunan Audited TA. 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,39% dari TA. 2024. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya realisasi pembayaran Gaji, Gaji Ke-13 dan Tunjangan Kinerja Ke-13 dan Tunjangan Kinerja ke-14 (THR), Penerimaan Pegawai PPPK sebanyak 20 orang, pegawai PPPK Paruh Waktu 3 orang, pegawai yang telah selesai melakukan Tugas Belajar serta Pengembalian belanja pegawai terdiri dari belanja pembulatan gaji PNS, belanja tunjangan suami/istri PNS, fungsional PNS, dan belanja tunjangan khusus/kegiatan/kinerja.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp322.551.398,-

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp322.551.398,- dan Rp933.898.945,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember TA 2025 dan

Jenis	31-Des-25	31-Des-24
Beban Persediaan konsumsi	297.697.399	819.329.945
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
Beban Persediaan bahan baku	3.674.000	1.145.000
Beban persediaan lainnya	21.179.999	113.424.000
Jumlah	322.551.398	933.898.945

Penjelasannya dari nilai beban persediaan pada periode Tahunan Audited TA. 2025 Sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp3.669.050.577,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.669.050.577,- dan Rp5.438.375.886,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA.2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (A)	749.902.170	2.054.135.279	(63,49)
Belanja Keperluan Perkantoran	657.382.170	1.028.490.429	(36,08)
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	-	933.320.850	(100,00)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	176.000	(100,00)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	92.520.000	92.148.000	0,40
Belanja Barang Operasional Lainnya	-	-	-
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional (B)	2.129.635.436	2.315.116.920	(8,01)
Belanja Bahan	175.103.119	293.614.200	(40,36)
Belanja Honor Output Kegiatan	9.000.000	20.674.000	(56,47)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.945.532.317	2.000.828.720	(2,76)
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
Belanja Jasa (C)	790.240.071	1.069.123.687	(26,09)
Belanja Langganan Listrik	183.191.280	313.207.100	(41,51)
Belanja Langganan Telepon	-	-	-
Belanja Langganan Air	59.643.200	9.478.200	529,27
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	83.516.450	233.747.566	(64,27)
Belanja Sewa	98.820.000	57.000.000	73,37
Belanja Jasa Profesi	91.270.000	117.933.000	(22,61)
Belanja Jasa Lainnya	273.799.141	337.757.821	(18,94)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
Jumlah Belanja (H=A+B+C)	3.669.777.677	5.438.375.886	(32,52)
Pengembalian beban barang non operasional lainnya	27.100	-	100,00
Pengembalian beban jasa lainnya	700.000	-	100,00
Jumlah Belanja Netto	3.669.050.577	5.438.375.886	(32,53)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp764.665.722,-

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp764.665.722,- dan Rp603.787.047,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	624.348.764	380.732.796	63,99
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.793.358	194.096.451	(27,46)
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	573.000	28.957.800	(98,02)
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Bruto	765.715.122	603.787.047	26,82
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.049.400	-	100,00
Jumlah Netto	764.665.722	603.787.047	26,82

Penjelasan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak
1	Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Kolam Tambak oleh CV. MULTIGUNA LESTARI	176.861.888
2	Pemeliharaan Bangunan Gudang Terbuka Permanen oleh CV. MUNDU PERMATA KONSTRUKSINDO	133.100.516
3	Perencanaan Pemeliharaan Asrama dan Rumah Susun Permanen oleh CV. KREASI MULTINDO	14.924.000
4	Pemeliharaan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen oleh CV. MUNDU PERMATA KONSTRUKSINDO	279.542.300
5	Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen oleh CV. KREASI MULTINDO	19.920.060
Jumlah		624.348.764

Pertanggungjawab GUP oleh Bendahara Pengeluaran selama tahun 2025 sebesar Rp141.366.358,- yang terdiri dari Pemeliharaan Asrama Permanen, Pemeliharaan Rumah Susun Permanen, Pemeliharaan Bangunan Kolam/Bak Ikan, Biaya Perencanaan, Pemeliharaan Gedung Bangunan Pendidikan dan Pemeliharaan AC di Gedung Rektorat Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp88.131.248,-

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp88.131.248,- dan Rp547.790.464,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	88.131.248	527.090.464	-83,28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	20.700.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan	-	-	-
Jumlah	88.131.248	547.790.464	-83,91

D.7 Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda
Rp0,-

Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp27.073.200,-. Tidak ada Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada periode Tahunan Audited TA.2025. Rincian Beban tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda Per 31 Desember TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	-	27.073.200	-100,00
Jumlah	-	27.073.200	-100,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.330.603.862,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.330.603.862,- dan Rp2.642.489.552,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember TA
2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	635.056.648	948.042.430	(33,01)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.091.802.183	1.090.702.093	0,10
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	508.538.874	508.538.872	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	27.710.094	27.710.094	-
Beban Penyusutan Jaringan	67.496.063	67.496.063	-
Jumlah Penyusutan	2.330.603.862	2.642.489.552	(11,80)

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp685,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp685,- dan Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember TA
2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	685	0	100
Jumlah	685	0	100

D.10 Kegiatan Non Operasional Lain

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember TA. 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 37. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember TA
2025 dan 2024

URAIAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Keg. Non Opr Lainnya	-	15.107.243	- 100
Beban dari Keg. Non Opr Lainnya	-	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	15.107.243	- 100
Jumlah Surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional lainnya	-	15.107.243	- 100

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp122.926.857.507,
-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp122.926.857.507,- dan Rp125.336.956.995,-.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(14.038.908.245),
-

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(14.038.908.245),- dan Rp(16.611.754.869),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas
Reklasifikasi* Rp0,-

Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- .

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi*
Rp0,-

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,-

E.5 Lain-Lain

Lain-lain
Rp(16.417.500),-

Lain-lain merupakan koreksi jurnal atas kelebihan pengakuan pendapatan sewa diterima dimuka di tahun anggaran berjalan. Koreksi lain-lain untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(16.417.500),- dan Rp0,-.

E.6 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp11.729.931.714,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.729.931.714,- dan Rp14.201.655.381,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp120.601.463.476,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp120.601.463.476- dan Rp122.926.857.507-.

PENGUNGKAPAN - PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

PENGUNGKAPAN INFORMASI KINERJA TAHUN 2025 PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 (AUDITED)

1. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Satker Politeknik KP Pangandaran terdapat pada fungsi ekonomi dengan rincian sebagaimana terlampir.

No	P N	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVR O	RVR O	%
1	P N	DL Program Pendidik an dan Pelatihan Vokasi	2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan	PDE Akreditasi Lembaga (Lembaga, Unit Kerja)	541 Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja)	103.351.000	79.876.868	1	1	100

2		DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan	SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan (Orang)	811 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten (Orang)	2.809.749.000	2.555.616.872	234	234	100
3		WA Program Dukungan Manajemen	2378 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	9.231.610.000	9.140.707.139	1	1	100
4		WA Program Dukungan Manajemen	2378 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	39.312.000	39.150.994	1	1	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Lingkup Politeknik KP Pangandaran TA 2025 senilai 79.876.868,00 atau 77,29% dari target Rp103.351.000,00

2. Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Satuan Kerja Politeknik KP Pangandaran terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 4 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian

Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas dan 1 kegiatan prioritas yang tersebar di satu satuan kerja Politeknik KP Pangandaran dengan pagu mencapai Rp103.351.000,- dan capaian realisasi anggaran senilai Rp79.876.868,00 atau 77,29% dengan rincian sebagai berikut:

Prioritas Nasional	No	Program Prioritas	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)	103.351.000,00	79.876.868,00	77,29

F.3 PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: KEP.100/MEN/KU.611/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Enam Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (UPT) Di lingkungan Kementerian Kelautan dan yaitu :

Jabatan	Semula	Menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Arpan Nasri Siregar, A.Pi.,M.S.T.Pi	Arpan Nasri Siregar, A.Pi.,M.S.T.Pi

2. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabatandatangani Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pangandaran yaitu :

Jabatan	Semula	Menjadi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	David Indra Widiyanto, M.Tr.Pi	David Indra Widiyanto, M.Tr.Pi
Pejabat Penguji Tagih/Penandatangani SPM (PPSPM)	Ariyanto, A.Md	Ariyanto, A.Md

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran yaitu :

Jabatan	Semula	Menjadi
Bendahara Pengeluaran	Djaduk Alif Prabangkara, A.Md.Pi	Djaduk Alif Prabangkara, A.Md.Pi
Bendahara Penerimaan	Vini Taru Febriani Prajayanti, S.ST.Pi.,M.Tr.Pi	Vini Taru Febriani Prajayanti, S.ST.Pi.,M.Tr.Pi